

AKIBAT HUKUM PEMBELIAN SAHAM PERUSAHAAN BUKAN PENANAMAN MODAL ASING OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN HUKUM ASING

Ucok Yoantha
Budiman Ginting, Suhaidi, Mahmul Siregar

Ucok.yoantha@yahoo.com

ABSTRACT

The presence of foreign capital investment in Indonesia is very important and strategic in supporting the implementation of national development. Indonesia's national development requires enormous funding to be able to support the economic growth rate is expected. Funding needs are not only can be obtained from domestic funding sources, but also from abroad. It causes foreign investment becoming one of foreign funding sources that support the strategic national development, especially in the development of the real sector which in turn is expected to have an impact on the opening of the field work widely. The results showed that foreign nationals or foreign corporations can make purchases in the acquisition of shares in the company after the acquisition but not PMA, the PMA company is not required to form a limited liability company may be acquired and even then there will be restrictions on ownership of foreign citizens or foreign legal entity the company instead of the PMA and the PMA company is not turned into a PMA company, whereas for the control and supervision carried out gradually from the center by BKPM up to the provincial and district / city.

Keyword : legal consequences, share purchase, a foreign legal entity

I. PENDAHULUAN**A. Latar belakang**

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.¹

Mekanisme penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; melalui pendirian perusahaan PMA, melalui pembelian saham dan melalui restrukturisasi. Dari ketiga mekanisme tersebut, pada kenyataannya yang sering timbul permasalahan adalah dalam hal pembelian saham. Pembelian saham atas suatu perusahaan bukan PMA atau perseroan terbatas oleh pihak asing atau perusahaan PMA dapat mengakibatkan status perusahaan target yang sahamnya dibeli tersebut berubah menjadi PMA.

Pada sisi lain pembelian saham oleh pihak asing juga tidak dapat dilakukan sembarangan karena menyangkut dengan bidang-bidang usaha yang diperbolehkan untuk dijalankan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal membatasi bidang usaha-usaha tertentu bagi kegiatan penanaman modal asing. Perpres tersebut juga mengatur mengenai pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia. Masalah-masalah yang muncul atas pembelian saham perusahaan PMDN oleh pihak asing tentu saja menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum dalam proses jual beli saham suatu perusahaan PMDN oleh pihak asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 15.

1. Bagaimana pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing?
2. Bagaimana kedudukan hukum perusahaan bukan PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing?
3. Bagaimana pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pembelian saham (akuisisi) bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pembelian saham secara akuisisi pada perusahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
2. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan kedudukan hukum perusahaan bukan PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
3. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pembelian saham (akuisisi) bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dilakukan penelitian untuk memberikan manfaat kepada semua, berikut manfaatnya adalah memberikan sejumlah manfaat/ kontribusi terhadap para akademisi maupun masyarakat umumnya serta dapat menambah khasanah ilmu hukum Penanaman Modal di Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori hukum perjanjian. Teori ini dipergunakan karena pada dasarnya pengalihan hak atas saham kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing didasarkan pada hubungan hukum perjanjian antara para pihak. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih.² Sedangkan menurut Pakar Hukum Perjanjian R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pembelian saham perusahaan bukan PMA, merupakan suatu sistem jual beli yang harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tentang penjualan, pembelian maupun penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilakukan dengan membeli saham. Aturan jual beli saham ini tidak dapat dilepaskan dengan syarat sahnya perjanjian yang disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, yaitu kesepakatan, cakupan, obyeknya tertentu dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut unsur subjektif yaitu kesepakatan dan cakupan dan unsur objektif yaitu obyeknya tertentu dan sebab yang halal.

Selanjutnya, didalam KUHPerdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. "Semua perjanjian" berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata pada intinya memberikan kebebasan bagi tiap-tiap subjek hukum untuk melakukan kontrak dengan muatan materi yang disepakati oleh kedua belah pihak, kebebasan tersebut meliputi isi, bentuk maupun hukumnya.

² Guse Prayudi, *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai Dari A-Z*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007), hal. 1.

³ *Op. Cit*, hal. 1.

Hukum kontrak mengenal asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of the parties*), kebebasan berkontrak merupakan alasan yang ideal bagi keseimbangan *bergaining power* di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak, tidak adanya perbuatan yang tidak adil yang dilakukan terhadap sebagian besar kepentingan ekonomi masyarakat.⁴

Kontrak yang dilakukan para pihak meskipun adanya suatu kebebasan dalam hal materi kontraknya, namun harus adanya suatu batas-batas yang melekat didalamnya. Dengan kata lain penerapan terhadap asas kebebasan berkontrak mempunyai konsekuensi yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), kepatutan serta kesusilaan atau tidak melanggar itikad baik serta undang-undang.

Pembelian saham perusahaan bukan PMA, merupakan suatu sistem jual beli yang harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tentang penjualan, pembelian maupun penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilakukan dengan membeli saham. Aturan jual beli saham ini tidak dapat dilepaskan dengan syarat sahnya perjanjian yang disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

Prinsip perlindungan hukum bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.⁵

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan *"rule of the law"*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang *represif*, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat *represif*.⁶

Perwujudan sarana perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dapat dilihat dalam peraturan mengenai, perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas dalam sebuah perusahaan bukan PMA yang sahamnya dibeli oleh warga negara asing atau badan hukum asing, contohnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan direksi ataupun komisaris yang melanggar *fiduciary duty*, sehingga merugikan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan bukan PMA yang sahamnya dibeli oleh warga Negara asing atau badan hukum asing.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembelian Saham Secara Akuisisi Pada Perusahaan Bukan PMA Oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing

Pengambilalihan saham lebih dikenal dengan istilah akuisisi. Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris yakni kata *acquisition* atau sering juga disebut *take over*. Menurut Munir Fuady, dalam buku Hukum Tentang Akuisisi, *take over* dan LBO⁷, istilah akuisisi diartikan sebagai pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Kamus hukum⁸ mengartikan akuisisi sebagai pengambilalihan harta benda.

⁴A.G.Guest, *Law of Contract*, (Oxford University Press, London, 1979), hal. 3-4.

⁵*Ibid.*, hal. 41.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 38.

⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 3.

⁸ Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 32

Akuisisi saham secara harfiah adalah membeli atau mendapatkan sesuatu/ objek untuk ditambahkan pada sesuatu/ objek yang telah dimiliki sebelumnya.⁹ Akuisisi dalam terminologi bisnis merupakan pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambilalih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.¹⁰ Dengan konteks ini maka akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut.

Biasanya dalam proses akuisisi, pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi, yang dimaksud dengan pengendalian, menurut Abdul Moin, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk (a) mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, (b) mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan (c) mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.¹¹

Adanya pengendalian ini maka pengakuisisi mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Dengan demikian, akuisisi sesungguhnya merupakan penggabungan usaha, namun kedudukan perusahaan tersebut tidak seimbang sehingga dikatakan sebagai pengambilalihan kepemilikan perusahaan, baik terhadap saham ataupun aset perusahaan.

Di dalam peraturan perundang-undangan, istilah akuisisi tidak digunakan, melainkan menggunakan istilah pengambilalihan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Berdasarkan definisi pengambilalihan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam pengambilalihan antara lain yaitu:

- a. Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum;
- b. Pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum;
- c. Metode pengambilalihan dengan cara melakukan pengambilalihan saham;
- d. Pengambilalihan saham itu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas tersebut;

Saham yang diambil alih tersebut harus bersifat signifikan dimana pengambilalihan saham tersebut memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih itu dapat mengendalikan perseroan yang diambilalih, dan jika saham yang diambilalih tersebut tidak signifikan atau yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan yang bersangkutan maka pengambilalihan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan atau akuisisi.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, mendefinisikan pengambilalihan adalah sama dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 angka 3). Selanjutnya pengambilalihan juga berkaitan dengan jenis-jenis pemasaran dan tujuan pengendalian dengan tujuan bagaimana cara yang akan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.

Adapun berdasarkan jenis usaha perseroan atau yang dikaitkan dengan pemasaran, pengambilalihan dapat dibedakan menjadi:¹²

- a. Pengambilalihan atau akuisisi horizontal yakni pengambilalihan yang bertujuan untuk mengambilalih Perseroan pesaing secara langsung yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama ataupun memiliki wilayah pemasaran yang sama.
- b. Pengambilalihan atau akuisisi vertikal adalah pengambilalihan yang bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir.

Pengambilalihan atau akuisisi konglomerat adalah pengambilalihan yang ditujukan untuk mengambilalih Perseroan lain yang tidak memiliki kaitan bisnis yang sama secara langsung dengan Perseroan yang diambilalih. Terhadap terjadinya akuisisi dalam perusahaan kesemuanya memiliki latar belakang yang didasari atas pertimbangan-pertimbangan matang, baik demi memperoleh keuntungan semata maupun demi keberlangsungan usaha dalam sebuah perusahaan. Sehingga tidaklah mungkin perusahaan atau pemilik saham dan direksi tidak memiliki berbagai alasan untuk mengambil kebijakan melakukan akuisisi pada perusahaan.

⁹ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Hukum UII, 2003), hal. 8.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 8.

¹¹ *Ibid.*, hal. 9.

¹² Iswi Hariyani Sefianto, *cita yustisia, Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal. 25.

Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya pengendalian perusahaan kepada perusahaan pengakuisisi. Pemegang saham yang tidak setuju atas pengambilalihan persoran, diberikan hak khusus yang disebut *appraisal right*, yaitu hak milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai *marger*, konsolidasi, akuisisi dan pemisahan Perusahaan (MKAPP) hanya boleh menggunakan haknya sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan *marger*, konsolidasi, akuisisi dan pemisahan perusahaan (MKAPP) tersebut.

Terjadinya akuisisi dalam sebuah perseroan tentu berpengaruh dengan anggaran dasar perusahaan. Akuisisi sebuah perseroan dapat merubah atau tidak merubah anggaran dasar suatu perseroan. Apabila akuisisi tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi di hadapan Notaris. Sedangkan jika akuisisi diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menkumham, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan anggaran dasar Menkumham. Apabila akuisisi disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menkumham, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta akuisisi dalam daftar perusahaan.

B. Kedudukan Hukum Perusahaan Bukan PMA Setelah Sahamnya Dibeli (Diakuisisi) Oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa bagi penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dengan berlakunya undang-undang ini juga menegaskan bahwasannya bentuk penanaman modal hanya terbagi atas Perusahaan Nasional yang bermodalkan Dalam Negeri (PMDN), Perusahaan Nasional yang bermodalkan Asing/ campuran (PMA) dan Perusahaan Asing (PA). yang mana apabila adanya percampuran modal antara modal dalam negeri dengan modal asing maka Perusahaan tersebut langsung dikategorikan sebuah perusahaan PMA.¹³

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun modal yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia minimal 5%.

Prosedur pendirian Perusahaan PMA di Indonesia sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, prosedur pendirian perusahaan PMA dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Pendirian perusahaan baru;
2. Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah ada.

Adapun bentuk perusahaan PMA ini diwajibkan dalam bentuk Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (2) UUPM. Terhadap perusahaan PMA ini, dapat berbentuk kantor perwakilan (*Representatives Office*), *Joint Venture* ataupun bentuk-bentuk lainnya.

Secara prosedural, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan PMA atas pendirian perusahaan baru maupun penyertaan atas perusahaan PMDN yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu PMDN menjadi PMA, maka PMDN tersebut harus meminta persetujuan-persetujuan layaknya mendirikan perusahaan baru. Yang berbeda hanyalah terhadap perusahaan *eksisting*, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan (TDP dan NPWP), melainkan hanya memerlukan persetujuan Menteri dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal.

Secara prosedural, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan PMA atas pendirian perusahaan baru maupun penyertaan atas perusahaan PMDN yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu PMDN menjadi PMA, maka PMDN tersebut harus meminta persetujuan-persetujuan layaknya mendirikan perusahaan baru. Yang berbeda hanyalah terhadap perusahaan *eksisting*, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan (TDP dan NPWP), melainkan hanya memerlukan persetujuan Menteri dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal.

¹³ *Ibid.*

Terkait dengan adanya Akuisisi yang dilakukan oleh PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing terhadap Perusahaan yang bukan PMA atau mengenai diperkenankan atau tidak para pemilik saham tersebut menjual seluruh saham ke Warga Negara Asing (WNA), harus dilihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan-peraturan perundangan lainnya.

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai Penanaman Modal Asing, harus memenuhi beberapa unsur berikut Pasal 1 ayat (3):

- a. Merupakan kegiatan menanam modal
- b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- c. Dilakukan oleh penanam modal asing,
- d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adanya unsur menanamkan modal baik sepenuhnya maupun patungan yang dilakukan orang asing memberikan sinyal akan dapat diberlakukannya akuisisi terhadap perusahaan yang bukan perusahaan PMA, dan diperjelas juga tentang memperoleh perusahaan yang dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Adapun Pasal 5 ayat (3) menerangkan bentuk penanaman modal dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Membeli saham
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban sebagai Perusahaan PMA, telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hak Penanam Modal Asing

Kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kewajiban itu, meliputi:¹⁴

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggungjawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM

C. Pengendalian dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembelian Saham (Akuisisi) Perusahaan Bukan PMA Oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi dasar hukum kegiatan pemantauan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁴ *Ibid*, hal. 212.

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dibidang penanaman modal.
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- e. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- f. Keputusan Kepala BKPM Nomor 90 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4/P/2009.
- g. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal.
- h. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pengawasan adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas pelayanan publik terhadap penanaman modal. Upaya atau kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan pemerintah atau terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal bukan terhadap instansi atau lembaga dalam melaksanakan tugasnya, melainkan terhadap perusahaan penanam dalam negeri dan penanaman modal yang ada unsur asing dalam merealisasikan persetujuan dari pemerintah atau dalam melakukan kegiatannya. Keberhasilan dalam melakukan tugas pengawasan berarti keberhasilan mengurangi pelanggaran yang berarti pula mengurangi kemungkinan dirugikan negara dan masyarakat.

Pembuatan BAP Proyek untuk keperluan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku, permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/ peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan, tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan, pengenaan sanksi dan pembatalan sanksi dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM sesuai dengan kewenangannya.

Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah dapat terdiri dari:¹⁶

- a. Kementerian/ instansi teknis;
- b. Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. Badan Pertanahan Nasional;
- e. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- g. Instansi terkait lainnya;
- h. BKPM

Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP Proyek.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, pengawasan terhadap penanaman modal dapat dibedakan 2 (dua) jenis yaitu:¹⁷

- a. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui penelitian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan yang mengacu kepada pendaftaran penanaman modal/izin Prinsip penanaman modal/izin Usaha Penanaman Modal yang di terbitkan baik mengenai realisasi investasi, sumber dana, bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi, lokasi proyek dan luas lahan, pemilik saham, jumlah tenaga kerja asing, jadwal waktu maupun ketentuan lain yang ditetapkan seperti, AMDAL, UKL, Kemitraan, dan lain-lain. Pengawasan tidak langsung ini juga bisa diperoleh dari laporan masyarakat, informasi media masa ataupun dengan infomasi dari instansi teknis terkait.

¹⁶ Pasal 16 ayat (6) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

¹⁷ Pasal 6 huruf (a) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

b. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lokasi proyek. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara rutin dan secara khusus apabila dalam pelaksanaan proyek diduga terdapat penyimpangan atau terjadi keresahan masyarakat.

Melalui pengawasan langsung dapat diketahui secara pasti adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

Pengawasan penanaman modal dilakukan secara *preventif* dan *korektif* (termasuk *represif*). Secara *preventif*, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan:¹⁸

1. Pemantauan kompilasi, yakni verifikasi serta evaluasi dari LKPM dan berbagai sumber lainnya;
2. Melakukan pembinaan dengan cara penyuluhan tentang aturan penanaman modal. Pembinaan juga dilakukan dengan cara memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan perizinan yang dimiliki penanam modal. Pembinaan lainnya dengan cara memberikan bantuan dan memfasilitasi investor yang mengalami masalah, kendala dan hambatan ketika merealisasikan proyek penanaman modalnya;
3. Melakukan pengawasan dengan cara meneliti dan mengevaluasi terhadap informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal beserta fasilitas yang telah diberikan kepada proyek investasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meninjau ke lokasi proyek penanaman modal secara langsung. Pengawasan selanjutnya dilakukan dengan menindaklanjuti penyimpangan terhadap ketentuan penanaman modal yang berlaku.

Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal ini dilakukan oleh Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM merupakan lembaga independen non-departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Presiden kemudian menetapkan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 3 September 2007 Perpres Nomor 90 Tahun 2007.

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 2 Perpres Nomor 90 Tahun 2007, maka BKPM memiliki tugas utama untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, BKPM mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada 23 Desember 2009 Perkap BKPM Nomor 13 Tahun 2009. Pengendalian Pelaksanaan Modal ini dimaksudkan untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Perkap BKPM Nomor 12 Tahun 2009 dilakukan melalui:¹⁹

- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal tersebut adalah:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota;
- b. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintahan provinsi;
- c. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah;

Instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana disebut di atas, PDKPM melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait. Sedangkan PDPPM melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait, di mana BKPM melakukan koordinasi dengan PDKPM, PDPPM dan instansi daerah terkait.

¹⁸Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, <http://forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/02/pengendalian-pelaksanaan-penanaman.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.

¹⁹ Pasal 6 huruf (c) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Dalam hal-hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan dua jenis pelayanan penanaman modal bagi para investor di wilayah Indonesia, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait, Gubernur dan Bupati/ Walikota.²⁰

Dengan adanya LKPM ini, maka segala perkembangan realisasi investasi dan produksi dari PT PMA dapat diawasi oleh BKPM yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada PDKPM atau PDPPM yang terkait. LKPM ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan:

1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Apabila PT PMA tidak menyampaikan kewajiban menyampaikan LKPM, maka PT PMA dapat dikenakan sanksi administratif di antaranya pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dapat melakukan pembelian saham secara (akuisisi) pada perusahaan bukan PMA namun setelah diakuisisi, perusahaan bukan PMA tersebut wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa tidak semua perusahaan bukan PMA sahamnya dapat diakuisisi oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, dan walaupun dapat diakuisisi maka akan ada pembatasan kepemilikan saham Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing pada perusahaan bukan PMA tersebut.
2. Kedudukan hukum perusahaan bukan PMA setelah sahamnya dibeli (diakuisisi) oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing adalah perusahaan bukan PMA tersebut berubah menjadi perusahaan PMA, namun setelah persyaratan-persyaratan administrasi dipenuhi termasuk permohonan perubahan status kepada Kepala BKPM. Terkait dengan fasilitas penanaman modal yang akan didapatkan oleh perusahaan bukan PMA yang sahamnya dibeli oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing tersebut, Penanam Modal Asing tersebut haruslah berbentuk badan hukum dan Penanam Modal Asing tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Penanaman Modal.
3. Pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pembelian saham (akuisisi) perusahaan bukan PMA oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing pelaksanaannya dapat berupa pemantauan, pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan pengawasan yang dilakukan oleh BKPM.

B. Saran

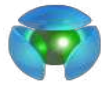
1. Bahwa dengan mudahnya pengambilalihan (akuisisi) perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dikhawatirkan susah untuk membeli kembali (*buy back*) oleh pemodal-pemodal dalam negeri nantinya, dimana diketahui bahwa pemodal dalam negeri sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam agar perusahaan yang didirikan oleh modal dalam negeri (PMDN) yang memiliki peluang produktif kedepannya dipelihara oleh pemerintah (pihak instansi pemerintah), sehingga nantinya apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar maka keuntungan tersebut dapat juga dimiliki oleh pemerintah khususnya pemodal dalam negeri.

²⁰Jenis-Jenis Perizinan dan Jangka Waktu Penerbitannya, <http://hukumpenanamanmodal.com/jenis-jenis-perizinan-dan-jangka-waktu-penerbitannya/#more-59>, diakses pada tanggal 15.

2. Bahwa terlalu banyaknya peraturan tentang perubahan dan penanaman modal asing akan mempersulit datangnya modal dari pihak asing, dimana pada prinsipnya setiap orang maupun perusahaan dalam menjalankan bisnis mengimplementasikan sebuah keuntungan. Untuk itu perlu penggabungan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian, baik dalam menganalisa bidang usaha maupun sanksi atas tindakan pelanggaran.
3. Meskipun pemerintah telah melakukan segala langkah dan upaya untuk menerapkan pengendalian dan pengawasan dalam penanaman modal, namun dalam prakteknya (implementasi) pelaksanaan peraturan tersebut masih terlihat longgar. Dimana segala bidang usaha terutama tentang bisnis penanaman modal masih sangat awam bagi sebagian warga Indonesia, sehingga warga negara Indonesia yang ingin melakukan pengawasan terhadap perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) tidak mengerti dan memahami, bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak PMDN atau PMA tersebut. Maka dari itu perlunya sosialisasi terus menerus dari pihak yang terkait, agar peraturan-peraturan penanaman modal tersebut dapat dimengerti seluruh warga Indonesia dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menutupi peluang kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady. Munir, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ibrahim. Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Iswi Hariyani, Sefianto, cita yustisia, *Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal. 173.
- K. Harjono. Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Raharja Grafindo Persada, 2007.
- M. Irsan Hasanuddin, & Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2006.
- Marwan. M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- [Moh. Mahfud MD, Taufiq Ismail, Sri Sultan Hamengkubuwana X, Prosiding Kongres Pancasila IV](#), Yogyakarta, 2012.
- Moin. Abdul, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Hukum UII, 2003.
- Molengraaff dalam buku, Sudaryat Permana, *Bikin Perusahaan Itu Gampang*, Yogyakarta: MedPress, 2009.
- Prayudi. Guse, *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai Dari A-Z*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007.
- Rakhmawati, N. Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Salim H. S. dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sembiring. Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.



Seokanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke-13, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Suny. Ismail, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1972.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, <http://forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/02/pengendalian-pelaksanaan-penanaman.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.

Jenis-Jenis Perizinan dan Jangka Waktu Penerbitannya, <http://hukumpenanamanmodal.com/jenis-jenis-perizinan-dan-jangka-waktu-penerbitannya/#more-59>, diakses pada tanggal 15.

Merger dan Akuisisi: Pengertian, Jenis, Alasan, Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi <http://pedulikip.wordpress.com/2013/03/28/merger-dan-akuisisi/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2014.

Hukum Penanaman Modal: Macam-macam Penanaman Modal dan berbagai Bentuk Kerjasamanya, <http://kuliahide.wordpress.com/2010/11/15/hukum-penanaman-modal-macam-macam-penanaman-modal-dan-berbagai-bentuk-kerjasamanya/>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.